

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Konflik politik berarti pertentangan kepentingan politik untuk memperoleh kekuasaan politik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan definisi konflik politik dari Ramlan Surbakti yang mendefinisikan konflik politik sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pada Penelitian ini juga berusaha menjelaskan terjadinya eskalasi konflik sebagai inti dari pembahasan dinamika konflik yang dipetakan dan diprediksi sehingga dapat dibuat pola eskalasi konflik.

Hasil dari temuan peneliti menyimpulkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik politik dalam kepemimpinan DPD Hanura Sumatera Barat. Pertama, adanya rasa ketidakpercayaan pengurus DPD Hanura Sumatera Barat terhadap ketua umum Oesman Sapta Odang. Kedua dilihat dari pendekatan struktural, konflik muncul akibat tidak tersedianya kebijakan atau aturan untuk mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan. Ketiga menguatnya sentimen kader senior yang berjasa dengan kader karbitan. Keempat peran kelompok eksternal dalam memanipulasi konflik dengan menambahkan kepentingan mereka dalam kelompok yang berkonflik.

Konflik dalam kepemimpinan DPD Hanura Sumatera Barat merupakan konflik yang terjadi karena effect dari konflik pusat. Eskalasi konflik dalam Hanura Sumbar dimulai sejak adanya pertemuan tertutup seluruh ketua DPD Hanura se-Indonesia, yang mana hasil dari pertemuan itu menghasilkan bahwa calon pengganti Wiranto ialah OSO sedangkan Marlis dan mayoritas ketua DPD Hanura meminta bapak Moeldoko sebagai ketua, dan beliau juga sudah sepakat. Namun Wiranto memaksa kami dengan beberapa pertimbangan untuk memilih OSO sebagai ketua umum. Keraguan yang muncul atas sosok kepemimpinan Oesman Sapta ternyata

membuahkan hasil ketika muncul pemecatan terhadap beberapa ketua DPD. Maka ketegangan juga tidak dapat dihentikan Marlis dibawah komando Sudding memobilisasi massa untuk membuat rapat Pleno guna memecat Oesman Sapta selaku ketua umum dan digantikan oleh Daryatmo.

Tak terima dengan pemecatan tersebut OSO juga melakukan pemecatan terhadap kader atau pengurus yang terbukti menjadi pembangkang. Wilayah kepengurusan Sumatera Barat sebagai salah satu actor konflik juga tak luput dari pemecatan. Pemecatan juga terjadi pada anggota DPRD yang berasal dari Hanura yang berjumlah 10 orang. Kepemimpinan Hanura Sumbar juga diambil alih oleh Marzul Veri dari latar belakang PPI dan HMI. Terpilihnya Marzul Veri sebagai ketua DPD juga tidak lepas dari peran Anas Lubis, Anisurrahman, dan I Gede Pasek Suardika.

Konflik ini juga dimanfaatkan Marzul Veri dalam melakukan peremajaan baik itu peremajaan pengurus maupun pembekalan ideologi bagi pengurus partai di tingkat DPC. Sampai pada berakhirnya penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa konflik politik di Hanura Sumbar tidak mengalami proses deeskalasi. Konflik ini juga menjadi penyebab gagal nya Hanura berada Parlemen, selain itu di Sumbar saja Hanura harus rela kehilangan seluruh kursinya di DPRD Provinsi ayan sebelumnya berjumlah 4 dan lebih 60 anggota DPRD Kab/kota yang awalnya berjumlah 48 kursi di masa Marlis.



6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Kajian tentang konflik politik dalam kepengurusan Hanura Sumbar harusnya mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan konsep konflik politik dan kelembagaan partai. Penelitian ini memiliki kekurangan dalam menjangkau data di DPP, selain itu penelitian ini juga belum bias memastikan bagaimana pola keuangan partai dalam pusaran konflik. Maka dari itu penelitian dengan topik konflik politik di kepartaian masih bisa dilakukan dengan mengambil potret konflik politik yang muncul

karena dominasi keluarga dalam pembagian jabatan-jabatan penting di kepengurusan partai. Seperti penyebab lahirnya kongres luar biasa yang terjadi di internal Partai Demokrat.

6.2.2 Saran Praktis

Sebagai salah satu negara demokrasi yang menerapkan sistem multipartai, tentu kajian konflik politik mampu menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemangku kebijakan baik di internal pemerintah maupun pengurus partai. Penelitian akan konflik politik dalam kepengurusan Hanura Sumatera Barat hendak mampu menjadi pembelajaran bagi partai-partai lain di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dalam menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi.

